

BAB III

PERAN INDONESIA SEBAGAI INISIATOR DAN FASILITATOR

Konsep peranan dapat menggambarkan fungsi dan tugas suatu negara ketika negara terlibat dalam suatu konteks atau masalah internasional. Dimana nantinya, peranan nasional juga dapat membantu memberikan pedoman untuk bertindak sesuai dengan fungsi negara tersebut. Misalnya, ketika suatu negara meyakini bahwa dirinya berfungsi sebagai pelindung regional maka tindakan yang akan dilakukan adalah melindungi negara-negara tetangganya dalam satu lingkup kebersamaan.

3.1 Peran Indonesia Sebagai Inisiator.

Konflik di Myanmar yang menyebabkan banyak korban dari warga Rohingya merupakan tragedi kemanusiaan. Apapun alasan di balik konflik tersebut, berbagai tindakan kekerasan yang menimpa warga Rohingya tidak dapat dibenarkan. Tidak ada satu ajaran agama mana pun yang membenarkan tindakan kekerasan dalam bentuk apapun, seperti teror, intimidasi, hingga penghilangan nyawa oleh siapa pun, kepada siapa pun, atas alasan apapun

Di Indonesia sendiri, berbagai protes, kritik, dan keberatan dari hampir seluruh aspek masyarakat atas peristiwa tersebut diartikulasikan melalui aksi demonstrasi di hampir seluruh provinsi di Indonesia. Langkah tersebut ditempuh untuk mendesak pemerintah Indonesia agar mengambil langkah-langkah strategis untuk menghentikan kekerasan terhadap etnis Muslim Rohingya. Mereka menganggap ada upaya pembantaian etnis Rohingya dalam konflik tersebut yang

dilakukan oleh Etnis Arakan dan pemerintah Myanmar. Oleh karena itu Indonesia bertindak sebagai inisiator. Inisiator adalah suatu kemampuan dalam menemukan peluang, menemukan ide atau mengembangkan ide serta cara-cara baru dalam memecahkan suatu problem.

3.1.1 Inisiator Dalam Mewujudkan Keamanan di Rakhine

Indonesia tidak dapat berdiam diri melihat tragedi kemanusiaan yang terjadi di Rakhine. Tragedi kemanusiaan rohingya di Rakhine telah menjadi isu politik yang mengundang reaksi keras dari masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Kondisi ini dapat memicu keamanan dalam negeri memburuk sehingga pemerintah Indonesia sebagai negara muslim diminta segera bertindak membantu Myanmar mengembalikan kondisi perdamaian di wilayah Rakhine, Myanmar.

Menyikapi hal tersebut, berbagai langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menjalankan peran sebagai inisiator dalam mengembalikan kondisi keamanan di Rakhine tersebut, sebagai berikut :

Pertama, di Istana Merdeka, Jl. Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Minggu 3 September 2017 Presiden Joko Widodo melakukan konferensi pers menyatakan bahwa telah memerintahkan secara langsung kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk melakukan komunikasi secara intensif dan bertemu langsung dengan pihak-pihak yang terkait dalam upaya menangani konflik yang terjadi di Rakhine. Meminta agar semua pihak di Rakhine menghentikan aksi kekerasan, memberikan perlindungan keamanan secara inklusif, memulihkan keamanan serta menghormati

hak asasi manusia (HAM) di Rakhine.⁴³ Dari hasil pernyataan tertulis tersebut sebagai awal formula kebijakan pemerintah Indonesia atas tragedi tindakan kekerasan kemanusiaan di Myanmar. Berikut kutipan konferensi pers presiden tersebut:

"Saya telah menugaskan Menlu Republik Indonesia menjalin komunikasi intensif dengan sejumlah pihak termasuk Sekjen PBB Antonio Guterres dan Komisi Penasehat Khusus untuk Rakhine Kofi Annan dan siang tadi Menlu Retno Marsudi telah berangkat ke Myanmar untuk bertemu Menlu Myanmar, Daw Aung San Suu Kyi, Commander in Chief of Defense Services, Senior General U Min Aung Hlaing, Menteri pada kantor Presiden, U Kyaw Tint Swe, dan Nasional Security Advisor, U Thaung Tun, untuk meminta agar menghentikan dan mencegah kekerasan, memberikan perlindungan kepada semua warga termasuk muslim di Myanmar dan memberikan akses bantuan kemanusiaan."

⁴³Utus Menlu ke Myanmar, Jokowi Minta Kekerasan ke Rohingya
Dihentikan <https://news.detik.com/berita/d-3626805/utus-menlu-ke-myanmar-jokowi-minta-kekerasan-ke-rohingya-dihentikan> diakses pada tanggal 11/11/2017.



Gambar 3.6 Presiden Joko Widodo memberi keterangan pers soal Rohingya di Istana Merdeka.⁴⁴

Kedua, Selasa pada tanggal 5 September 2017, di Kantor Wapres, Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla mengatakan, Pemerintah Indonesia akan membawa persoalan Rohingya pada forum Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Kazakhstan. Menurut Jusuf Kalla dirinya akan bertemu banyak pimpinan negara di forum tersebut sehingga hal ini menjadi sebuah kesempatan untuk membicarakan persoalan Rohingya ditingkat forum Internasional meskipun tema utama Forum OKI di Kazakhstan adalah ilmu pengetahuan dan teknologi⁴⁵.

⁴⁴ Ibid

⁴⁵ Moh. Nadlir. 2017. Indonesia Akan Bawa Krisis Rohingya ke Forum Internasional. <http://nasional.kompas.com/read/2017/09/05/16592381/indonesia-akan-bawa-krisis-rohingya-ke-forum-internasional> diakses pada tanggal 11/11/2017.



Gambar 3.7. Wapres Jusuf Kalla di KTT OKI Kazakhstan.⁴⁶

Dari forum OKI tersebut, Akhirnya ajakan selamatkan warga rohingya menggema di KTT OKI Presiden Kazakhstan Nursultan Nazarbayev menyatakan dia juga berjanji, atas nama OKI akan ikut berperan aktif dalam menyelesaikan konflik rohingya tersebut. Senada dengan Nazar, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan juga menyatakan dukungannya atas penyelesaian kasus Rohingya. Ia mengatakan, apa yang terjadi di Rakhine, Myanmar, merupakan keprihatinan bersama sehingga Turki sangat mengutuk keras atas apa yang terjadi terhadap etnis Rohingya⁴⁷. Kita sebagai negara-negara Islam tentu harus melakukan dukungan kepada Rohingya. Kekerasan dan tragedi yang terjadi disana harus dihentikan.

⁴⁶Antara foto/setwapres-syamsu millah. 2017. wapres hadiri ktt oki <https://www.antaranews.com/foto/111953/wapres-hadiri-ktt-oki> diakses pada tanggal 11/11/2017.

⁴⁷Liputan6.comLiputan6.com. 2017. Hadiri KTT OKI di Kazakhstan, Ini yang Dilakukan Wapres JK <http://news.liputan6.com/read/3089145/hadiri-ktt-oki-di-kazakhstan-ini-yang-dilakukan-wapres-jk> diakses pada tanggal 11/11/2017.

Ketiga, konflik Rohingya dibahas secara khusus di sela-sela pelaksanaan sidang umum PBB ke-72 di New York pada tanggal 19 September 2017. Menurut Jusuf Kalla langkah yang tepat dilakukan adalah tekanan agar Myanmar segera menghentikan kekerasan terhadap etnis Rohingya. Jusuf Kalla menjelaskan, memang tidak mudah mencari penyelesaian konflik yang berlangsung di negara bagian Rakhine itu. Masalahnya lebih banyak disebabkan persoalan di dalam negeri. Jadi, tidak bisa satu negara ikut campur terlalu jauh. Tapi, tekanan dari dunia Internasional, termasuk PBB, dibutuhkan agar pemerintah Myanmar bisa segera menyelesaikan persoalan tersebut. Karena itu, UN (PBB) sendiri berdasar tim pencari fakta dan negara-negara lain, termasuk OKI, memberikan pressure politik sehingga mereka (Myanmar) lebih terbuka untuk menghentikan⁴⁸.

3.2.2 Inisiator Dalam Menangani Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Pertama, tindakan sewenang-wenang pemerintah dan militer Myanmar terhadap penduduk di negara bagian Rakhine merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang sangat berat. Eksekutif Human Rights Working Group (HRWG) mencatat bahwa inisiasi yang telah dilakukan oleh komunitas internasional, regional, dan berbagai pihak untuk menghentikan kekerasan terhadap Rohingya. Namun, hal tersebut tidak kunjung menghentikan aksi-aksi kekerasan terhadap Rohingya. Gagalnya inisiasi menurut direktur HRWG disebabkan karena belum selesainya reformasi sektor keamanan di negara Myanmar. Militer masih

⁴⁸Juneka Subaihul Mufid. 2017. Bawa Kasus Rohingya ke DK PBB
<https://www.jawapos.com/read/2017/09/21/158524/bawa-kasus-rohingya-ke-dk-pbb> diakses pada tanggal 11/11/2017.

mencengkeram kuat secara politik.⁴⁹Direktur Eksekutif Human Rights Working Group (HRWG) memandang perlu bagi pemerintah Indonesia untuk membentuk kaukus diplomasi permanen, baik di level pemerintahan maupun parlemen. Di sisi yang lain, kerjasama militer yang telah dilakukan oleh Indonesia dan sejumlah Negara lain juga harus menjadi saluran diplomasi untuk menekan militer Myanmar menghentikan serangan dan kekerasan kepada Rohingya⁵⁰.

Di level ASEAN, pemerintah Indonesia yang bisa meyakinkan Myanmar untuk terlibat dalam Informal ASEAN Foreign Ministers Retreat di Myanmar pada 18 Desember 2016 yang lalu dan merupakan langkah awal bagi Pemerintah Indonesia untuk melanjutkan diplomasi yang lebih efektif, dengan mengajak negara-negara di luar ASEAN, eksekutif, legislatif, maupun militer, untuk mencegah terjadinya kekerasan baru.⁵¹HRWG memandang bahwa terdapat friksi yang cukup kuat di dalam pemerintahan di Myanmar yang menyebabkan konflik dan kekerasan terus berlanjut. Untuk itu pula, upaya inisiasi yang pantas dilakukan harus mengarah pada keterlibatan oleh semua pihak.

Kedua, pada Kamis tanggal 7 September 2017, di Sekretariat Ikatan Alumni Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta Pusat, Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais menilai pemerintah perlu menunjukkan sikap yang sedikit lebih tegas terhadap Myanmar guna mengatasi masalah kemanusiaan, yakni krisis Rohingya, di Rakhine State, Myanmar. Indonesia harus menggalang kekuatan negara-negara ASEAN atau multilateral lainnya untuk bisa melakukan pressure (tekanan). Indonesia bisa

⁴⁹asean advocacy, media coverage. 2017. hrwg: inisiatif aung san suu kyi terkait rohingya tak direspons militer <https://hrwg.org/page/2/> diakses pada tanggal 14/11/2017.

⁵⁰Ibid.,

⁵¹ Ibid.,

menyuarakan kepada Sekjen PBB untuk menerjunkan pasukan perdamaian di Myanmar. Sebab, salah satu aturan di PBB bahwa setiap negara punya kewajiban menjamin perlindungan hukum, HAM, sosial, ekonomi seluruh elemen bangsanya. Jika negara tersebut gagal melindungi seluruh elemen bangsanya, maka kewajiban negara lain, terutama yang paling dekat dengan negara tersebut, berhak melakukan intervensi kemanusiaan.⁵²Langkah ini bisa sebagai tindakan alternatif jika diplomasi dan negosiasi yang sudah dilakukan tidak memberi dampak positif.

Peran Indonesia Sebagai Fasilitator

Tragedi kemanusiaan di Rakhine State, Myanmar membuat banyak negara merasa prihatin. Warga etnis Rohingya menjadi korban kekerasan militer Myanmar. Kekerasan terhadap warga sipil terus terjadi hingga sekarang. Puluhan ribu warga etnis Rohingya terpaksa mengungsi ke negara terdekat karena tekanan dari militer Myanmar. Kondisi mereka sungguh memprihatinkan. Bahkan pengungsi yang mencari perlindungan di Bangladesh juga mengalami ketidakpastian.

Kecaman dari berbagai pihak terus didengung-dengungkan. Tak terkecuali dalam negeri kita sendiri Indonesia. Posisi Indonesia yang berada dalam satu lingkaran keanggotaan negara ASEAN dengan Myanmar mewajibkan Indonesia harus ikut aktif dalam mendorong pemerintah Myanmar untuk menghentikan segala bentuk kekerasan atas apa yang dialami warga rohingya dari tindakan militer

⁵²Fachrudin, 2017 "Krisis Rohingya, Pemerintah RI Diminta Ajak ASEAN untuk Tekan Myanmar" <http://nasional.kompas.com/read/2017/09/07/15372061/krisis-rohingya-pemerintah-ri-diminta-ajak-asean-untuk-tekan-myanmar> diakses pada tanggal 07 oktober 2017

Myanmar sendiri. Oleh sebab itu Indonesia bertindak sebagai fasilitator demi mewujudkan harapan agar kondisi keamanan di Myanmar dapat dikembalikan.

3.3.1 Fasilitator Dalam Melindungi Pengungsi Etnis Rohingya.

Para pengungsi asal Rohingya tersebut keluar dari Myanmar karena mereka merasa sudah tidak aman lagi untuk tinggal di negaranya sendiri. Rohingya merupakan komunitas muslim yang minoritas di daerah utara Arakan, sebelah barat Myanmar. Mereka dianggap sebagai orang-orang yang tak bernegara dan tidak diakui penuh kewarganegaraan oleh pemerintah Myanmar. Masyarakat Rohingya dianggap sebagai penduduk sementara dan tidak mendapatkan hak kewarganegaraan penuh.

Masyarakat Indonesia bersama dengan pemerintah turut memberikan perhatian khusus terhadap tindakan kekerasan atas apa yang dialami oleh warga rohingya. Warga rohingya merupakan warga muslim dan Indonesia yang merupakan penduduk muslim terbesar di dunia tentu sangat perhatian atas apa yang dialami warga rohingya, oleh karena itu Indonesia juga mengambil langkah kongkrit dalam mewujudkan perlindungan hak asasi manusia bagi pengungsi rohingya. Berikut langkah kongkrit Indonesia ialah memfasilitasi para pengungsi dari rohingya. Berikut sikap pemerintah Indonesia sebagai fasilitator, dilaksanakan sebagai mana berikut ini :

Pertama, tanggal 19 Mei 2015 di Kantor Presiden, Menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan total pengungsi Rohingya yang berada di Indonesia sebanyak 11.941 orang. Para pengungsi tersebut diterima secara baik di Indonesia baik dari masyarakat Indonesia itu sendiri maupun pemerintah. Jumlah

pengungsi Rohingya tersebut kini masih dalam posisi menunggu untuk diverifikasi maupun menunggu masa penempatan ke negara ketiga. Kami sudah bekerjasama dengan UNHCR dan IOM dengan menyediakan tempat tinggal, kebutuhan makanan dan kesehatan yang diperlukan apabila kesehatan pengungsi memburuk.⁵³

Keberadaan pengungsi Rohingya di Indonesia sudah sejak 2009 silam. Mereka berada di wilayah Medan, Aceh, Pasuruan dan Sidoarjo. Untuk di wilayah Sumut, mereka tersebar di enam titik pengungsi. Salah satunya di Hotel Beraspati, selain itu Hotel Pelangi di Jalan Djamin Ginting, Hotel Top Inn di Tanjung Selamat, Wisma YPAP I di Jalan Bunga Cempaka, Graha Ayura di Lubuk Pakam, Deli Serdang. Terakhir, lokasi penampungan di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Medan. Total terdapat 435 pengungsi Rohingya yang ada di Sumatera Utara yang tersebar di 6 lokasi itu. Para pengungsi tercatat datang sejak 8 tahun lalu, umumnya mendapatkan uang bulanan. Untuk dewasa diberi Rp 1,25 juta per orang. Sedangkan anak-anak Rp 500 ribu per orang. Fasilitas juga lengkap, ada sarana berolahraga. Uang dan fasilitas diperoleh dari UNHCR digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari selama dalam pengungsian. Ada keluarga yang mendapat Rp 6 juta sebulan. Fasilitas milik hotel cukup lengkap, listrik, air hingga

⁵³Ada 12 ribu Pengungsi Rohingya di Indonesia <http://internasional.metrotvnews.com/read/2015/05/19/127518/ada-12-ribu-pengungsi-rohingya-di-indonesia>” diakses pada tanggal 03 oktober 2017

jaringan internet semuanya dimanfaatkan dan gratis. Terutama keberadaan internet begitu penting guna mengetahui kabar terkini keluarga mereka.⁵⁴

Kondisi yang sama dirasakan pengungsi Rohingya di Sidoarjo. Di sana lebih kurang diisi 13 orang pengungsi. UNHCR menampung mereka di Apartemen Sederhana (Apama) yang berlokasi di Komplek Puspa Agro Sidoarjo. Hidup mereka ditanggung, nyaman dan mereka tidak harus merasakan ketakutan. Mereka juga diberikan uang bulanan sama seperti pengungsi Rohingya di Sumatera Utara. Sebelumnya 13 pengungsi Rohingya diamankan di sejumlah wilayah di Jawa Timur seperti ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Surabaya di Pasuruan, beberapa kantor imigrasi Malang, Waru dan Sumenep dan mereka masih berstatus imigran gelap. Setelah pihak imigrasi melakukan upaya koordinasi dengan UNHCR dan IOM dengan melakukan interview langsung kepada belasan warga Rohingya yang kemudian mendapat persetujuan merubah status Etnis Rohingya sebagai pengungsi dan akhirnya mereka dipindahkan di Komplek Puspa Agro Sidoarjo.⁵⁵ Di bawah naungan United Nations High Commissioner for

⁵⁴Gelisah pengungsi Rohingya di Indonesia <https://www.merdeka.com/khas/gelisah-pengungsi-rohingya-di-indonesia.html> diakses tanggal 16/1/2018

⁵⁵13 Warga Rohingya Pernah Berada di Pasuruan. <http://www.wartabromo.com/2017/09/09/13warga-rohingya-pernah-berada-di-pasuruan/> diakses tanggal 20/1/2018

Refugees (UNHCR) mereka mendapat hidup cukup layak. PBB langsung turun tangan dalam pemberian dana pengungsi.

Etnis Rohingya yang berada di Aceh sudah tinggal sejak 7 tahun terakhir, dimana tercatat pada 3 Februari 2009 sekitar 198 orang pengungsi Rohingya (semuanya laki-laki) diselamatkan oleh nelayan Idi Rayeuk ke pelabuhan Kuala Idi karena boat yang mereka tumpangi sudah tidak memiliki mesin serta tidak memiliki stok makanan dan minuman sama sekali. Sejak itu sejumlah rombongan silih berganti tiba mendarat di pantai Aceh melalui sejumlah titik berbeda. Lokasi geografis provinsi Aceh terletak di mulut selat Malaka yang merupakan jalur lintas kapal internasional. Demikian halnya lalu lintas kelompok nelayan Aceh yang beroperasi menangkap ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) menjadi faktor penting yang mempertermukan para pengungsi Rohingya dengan masyarakat Aceh dan Indonesia. Lembaga-lembaga kemanusiaan dan pemerintah daerah Aceh sudah bersepaham untuk menempatkan pengungsi Rohingya di suatu lokasi pemukiman yang permanen di kabupaten Aceh Utara dan Kota Langsa. Pemukiman terdiri dari kamar-kamar, MCK, tempat belajar, bermain dan olahraga.⁵⁶

Selain itu pemerintah Indonesia juga memberikan bantuan pada masyarakat etnis Rohingya yang menjadi korban pelanggaran kekerasan, pihak pemerintah indonesia telah melakukan usaha dengan memfasilitasi pengiriman bantuan kemanusiaan dari masyarakat indonesia ke pengungsi rohingya baik yang berada di

⁵⁶HIDUP DALAM PENANTIAN Setahun Pengungsi Rohingya di Aceh
www.geutanyoe.org/images/...Hidup-Dalam-Penantian-YayasanGeutanyoe.pdf diakses tanggal 16/1/2018

Bangladesh maupun yang ada di Myanmar akses bantuan kemanusiaan seperti bahan-bahan makanan, pasokan medis, pakaian, tempat tinggal, layanan sosial, dan dukungan kepada etnis Rohingya, termasuk pemulihan bangunan yang rusak milik masyarakat etnis Rohingya seperti sekolah dan masjid. Hal ini diharapkan dapat membantu pemulihan kondisi etnis Rohingya yang semakin memprihatinkan karena dampak dari sikap diskriminasi yang ditujukan kepada mereka.

Kedua, pada tanggal 14 September 2017 di Bandara Chittagong. Sampai dengan 16 September 2017, sebanyak 54 ton bantuan kemanusiaan dari Indonesia telah sampai di Chittagong dalam 6 kali pengiriman dengan pesawat C-130 TNI AU. Bantuan kemanusiaan Indonesia telah diterima oleh Pemerintah Bangladesh dan akan segera didistribusikan kepada pengungsi dari Rakhine State yang berada di sekitar Cox's Bazar. Dubes Rina Soemarno selaku wakil Pemerintah Indonesia telah menyerahkan bantuan Indonesia kepada Kepala District Administration Chittagong, Zillur Rahman Chowdhury. Bantuan kemanusiaan tersebut berupa beras (30 ton), selimut (14.000), sarung (17.400) makanan siap saji (2490 paket), generator listrik (10 set) tenda besar (20 unit), tanki air fleksibel (10 unit), *family kit* (850 paket), pakaian (900 paket), gula pasir (1 ton), minyak goreng (325 boks), dan biskuit (2000 boks). Bantuan Indonesia yang sudah tiba dalam 4 kali pengiriman pertama antara tanggal 14-15 September 2017 telah dipindahkan dari Bandara Chittagong ke gudang Pemerintah District Administration di Cox's Bazar, bersama

dengan bantuan dari beberapa negara lain seperti Maroko, India, dan Iran yang datang pada saat bersamaan.⁵⁷



Gambar 3.9 Dubes RI, Rina Soemarno menyerahkan bantuan Indonesia kepada Kepala District Administration Chittagong, Zillur Rahman Chowdhury, di Bandara Chittagong⁵⁸

Sebisa mungkin pemerintah Indonesia dan UNHCR akan menjadi fasilitator dan memberikan bantuan serta perlindungan bagi seluruh masyarakat Internasional yang membutuhkan perlindungan hukum yang berada di wilayah teritorial, agar para korban merasa aman dan nyaman untuk bertempat tinggal di tempat sementara mereka, sebelum mereka ditempatkan ke negara ketiga atau jika dimungkinkan dapat dikembalikan ke negara asalnya.

3.3.2 Fasilitator Untuk Mengembalikan Kedamaian di Rakhine

⁵⁷Mataindonesia.id. 2017. Pemerintah Kirim Bantuan Sebanyak 54 Ton untuk Pengungsi Rohingya di Bangladesh " <http://mataindonesia.id/internasional/pemerintah-kirim-bantuan-sebanyak-54-ton-untuk-pengungsi-rohingya-di-bangladesh/> diakses pada tanggal 15/11/2017.

⁵⁸ Ibid.,

Pemerintah Indonesia mengambil peran penting sebagai fasilitator untuk mengembalikan situasi kedamaian di Rakhine.

Pertama, pada hari Kamis 14 September 2017 Presidium Medical Rescue Committee Indonesia (MERCi), Sarbini Abdul Murad di Palang Merah Indonesia di Jakarta. Menyatakan bahwa selain pemerintah, masyarakat Indonesia juga membantu pembangunan rumah sakit Indonesia di Myanmar ini sebagai wujud kepedulian masyarakat Indonesia terhadap kemanusiaan dalam membantu warga Rohingya melalui lembaga swadaya masyarakat yaitu Medical Rescue Committee Indonesia (MERCi).⁵⁹ Pembangunan rumah sakit tersebut adalah upaya untuk tetap merukunkan umat manusia dari segala macam perbedaan selain itu bentuk untuk memperkenalkan harmonisasi hubungan antara umat beragama di Indonesia kepada masyarakat dan pemerintah Myanmar.

Dalam proses membangun rumah sakit Indonesia di Myanmar tersebut, Medical Rescue Committee Indonesia (MERCi) melakukan upaya-upaya dengan melibatkan pihak-pihak terkait untuk bersama-sama mengulurkan bantuan. Palang Merah Indonesia juga sangat menyetujui pembangunan rumah sakit untuk kemanusiaan khususnya di daerah rawan konflik.

Kedua, masyarakat Indonesia juga melakukan pengumpulan bantuan yang bersifat jangka pendek yang sangat dibutuhkan para pengungsi warga etnis Rohingya seperti obat-obatan, makanan dan pakaian yang disalurkan melalui pemerintah Indonesia. Pemberian makanan, obat-obatan dan pakaian merupakan

⁵⁹Lince Eppang, 2017 "Pembangunan RSI di Myanmar Inisiasi Masyarakat Indonesia" <http://www.netralnews.com/news/kesra/read/101828/pembangunan.rsi.di.myanmar.inisiasi.masy> diakses pada tanggal 07 oktober 2017

bantuan yang bersifat jangka pendek sehingga masyarakat Indonesia melalui Medical Rescue Committee Indonesia (MERCİ) berupaya untuk menyalurkan bantuan secara berkesinambungan. Maka itu kami berpikir dengan mendirikan Rumah Sakit merupakan tempat yang sangat tepat untuk memberitahukan kepada masyarakat Myanmar akan simbol keberagaman, simbol harmonisasi umat beragama di Indonesia.

Ketiga, pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017, di Istana Wapres Jakarta. Menurut Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) AM Fachir yang ditemui usai menghadap Wakil Presiden republik Indonesia Jusuf Kalla. Bahwa bentuk fasilitator yang akan diwujudkan masyarakat Indonesia melalui 15 organisasi kemanusiaan hendak membuat konsep pasar perdamaian di negara bagian Rakhine Myanmar. Melalui konsep pasar perdamaian, Fachir mengharapkan terjadi interaksi antar golongan di Myanmar sehingga tercipta perdamaian. Mengingat, pasar adalah tempat transaksi bagi siapapun dengan latar belakang apapun⁶⁰.

Keempat, aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM) memprakarsai program Humanitarian Assistance for Sustainable Community (HASCO) untuk Myanmar. HASCO diluncurkan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Republik Indonesia, Retno Marsudi, di Gedung Pancasila. Peluncuran program tersebut dihadiri oleh sejumlah perwakilan asing, perwakilan organisasi

⁶⁰Novi Setuningsih, 2017 "Indonesia Siapkan Pasar Perdamaian di Myanmar"
<http://www.beritasatu.com/dunia/420041-indonesia-siapkan-pasar-perdamaian-di-myanmar.html> diakses pada tanggal 03 oktober 2017

internasional di Jakarta, dan organisasi sosial kemasyarakatan yang ada di Indonesia.⁶¹

Bantuan yang diberikan HASCO adalah model bantuan internasional yang partisipatif dan inklusif, serta dianggap sejalan dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Advisory Commission on Rakhine State yang dipimpin oleh Koffi Annan. HASCO ingin memberikan bantuan bagi rakyat Myanmar guna meningkatkan kapasitas, pengiriman tenaga ahli, *livelihood* (penghidupan), dan pemulihan. Menlu RI juga menegaskan kembali komitmen Indonesia yang tinggi untuk mendukung upaya Myanmar dalam mewujudkan reformasi, rekonsiliasi, dan pembangunan inklusif di Myanmar, termasuk memperkuat proses demokrasi di Myanmar. Selain itu, Menlu juga mengapresiasi komitmen sejumlah lembaga untuk berkontribusi bagi pendirian rumah sakit/*health center* di negara bagian Rakhine, Myanmar, dalam rangka membantu proses rekonsiliasi dan pemulihan daerah tersebut.

Dalam program ini, sebanyak 11 organisasi sosial kemasyarakatan yang berkomitmen untuk memberikan bantuan di bidang peningkatan kapasitas pengiriman tenaga ahli, penghidupan, dan pemulihan. Sampai saat ini Indonesiatelah memberikan bantuan berupa empat sekolah senilai USD 1 juta di komunitas Muslim dan Buddha di Rakhine yang diresmikan pada tahun 2014, lalu 10 kontainer berisi makanan dan pakaian yang diluncurkan oleh Presiden RI pada

⁶¹Kemlu-AKIM Luncurkan Program Bantuan Kemanusiaan untuk Rakhine
<https://jpp.go.id/peristiwa/internasional/310277-kemlu-akim-luncurkan-program-bantuan-kemanusiaan-untuk-rakhine> diakses tanggal 16-1-2018

Desember 2016, serta dua sekolah di Sittwe, Rakhine yang diresmikan pada bulan Januari 2017.⁶²



⁶²ibid